

KEEFEKTIFAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENANGGULANGAN PELACURAN REMAJA

(STUDI TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN REMAJA
OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA)

LK
Fw AH 13/01
Nis
K

SKRIPSI



OLEH :

Sugianto Catur Wibowo

NIM : 079615273

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A

Semester Gasal Tahun 2000 / 2001

KEEFEKTIFAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENANGGULANGAN PELACURAN REMAJA

(STUDI TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN REMAJA
OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA)

SKRIPSI

Disajikan Guna Melengkapi Tugas–Tugas Dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



OLEH :

Sugianto Catur Wibowo

NIM : 079615273

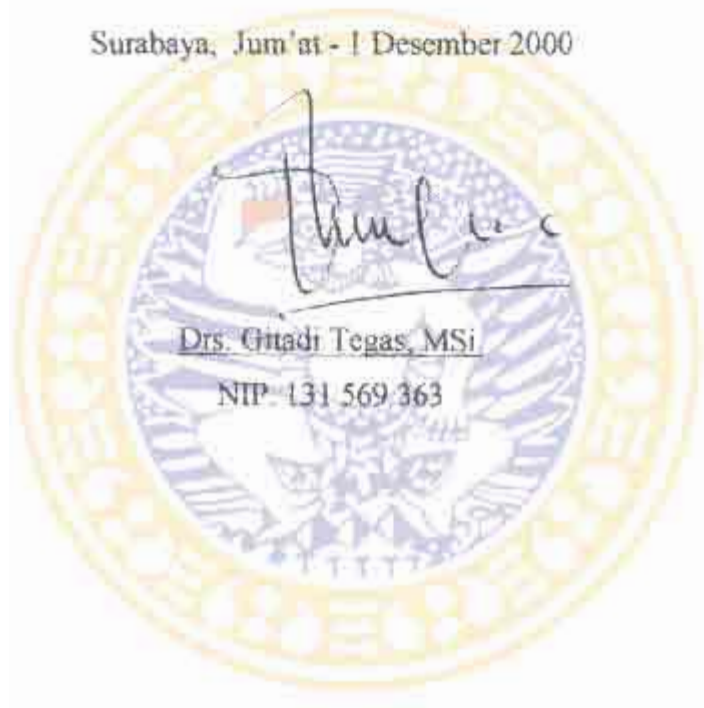
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A

Semester Gasal Tahun 2000 / 2001

Halaman Persetujuan

Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan
di depan Dewan Penguji.

Surabaya, Jum'at - 1 Desember 2000



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan dewan penguji

Hari : Jum'at
Tanggal : 15 Desember 2000
Waktu : 09.00 WIB

Dewan penguji terdiri dari:



Anggota,

A handwritten signature in black ink, belonging to Drs. Gitadi Tegas, MSi.

Drs. Gitadi Tegas, MSi.
NIP. 131 569 363

Anggota,

A large, stylized handwritten signature in black ink, belonging to Drs. Sunaryo, MPSt.

Drs. Sunaryo, MPSt.
NIP. 131 801 641

ABSTRAKSI

Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar ke-dua di Indonesia, mengalami berbagai dinamika dalam perjalanannya, berupa keberhasilan yang dicapai maupun permasalahan yang dihadapi.

Seperti halnya dengan kota-kota lain di Indonesia, pelacuran merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh hampir setiap daerah. Berbagai macam reaksi telah diberikan oleh masyarakat dan pemerintah setempat untuk menangani masalah ini. Dan dalam hasil penelitian berikut akan dikemukakan mengenai bagaimana keefektifan kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanggulangan pelacuran remaja di wilayahnya.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian survai yang ditujukan untuk maksud penjajagan (eksploratif) dikarenakan pengetahuan peneliti tentang masalah kebijakan untuk penanggulangan pelacuran remaja yang akan diteliti masih terlalu sedikit untuk dapat melakukan studi deskriptif dan masih sangat terbatasnya penelitian yang khusus membahas tentang tema tersebut diatas.

Sedangkan pendekatan survai yang digunakan adalah pendekatan survai evaluasi formatif yaitu melihat dan meneliti pelaksanaan suatu program, serta mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan teori keefektifan kebijakan yang dikemukakan oleh George Poulos dan Tannembaum, bahwa kriteria umum yang terkandung dalam keefektifan kebijakan adalah : Produktifitas dari kebijakan, keberhasilan kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang datang dari luar serta tidak adanya tekanan dan ketegangan yang terjadi antar unsur pelaksana. Secara lebih terperinci dalam bukunya organisasi dan manajemen Ero H. Rosyidi menjelaskan bahwa keefektifan kebijakan dapat dilihat berdasarkan Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa dan penyusunan kebijaksanaan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

Selain itu terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu kebijakan sehingga kebijakan itu nantinya akan dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai secara maksimal. Faktor-faktor tersebut antara lain : Faktor lingkungan internal maupun eksternal dari tempat dimana kebijakan tersebut diterapkan serta faktor motivasi dan perilaku pegawai.

Dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terdapat kelemahan-kelemahan yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak bisa berjalan dengan efektif. Tidak jelasnya tujuan yang hendak dicapai,

strategi yang telah ditetapkan tidak bisa direalisasikan dengan optimal, proses analisis dan penyusunan kebijaksanaan tentang penanggulangan pelacuran remaja belum secara mantap terlaksana.

Perencanaan yang telah dibuat tidak tersusun secara mantap disebabkan kurang bisa memperkirakan keadaan yang akan dihadapi serta rendahnya orientasi ke depan. Program yang disusun tidak tepat mengenai sasaran karena program yang dibuat dalam kenyataannya bukan hanya ditujukan untuk penanggulangan pelacuran remaja tapi lebih sebagai suatu program yang bersifat simbolik yaitu suatu program yang dibuat dengan kemungkinan program tersebut bisa menguntungkan ataupun sebaliknya yaitu merugikan, tetapi dalam pelaksanaannya program tersebut hanya memiliki dampak riil yang kecil terhadap masyarakat. Dengan demikian program ini bersifat tidak memaksa (*Non-Enforcement*) melainkan berupa himbauan saja, sehingga obyek dari program itu sendiri yaitu para pelacur tidak merasakan atau menyadari kemanfaatan dari program tersebut, keterbatasan sarana dan prasarana kerja serta tidak meratanya penempatan yang dilakukan merupakan salah satu penyebab bagi tidak efektifnya kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanggulangan pelacuran remaja.

Adanya hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan pelacuran remaja tersebut, telah mengakibatkan tidak bisa tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Dan dari berbagai macam kegiatan operasional yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanggulangan pelacuran remaja, apakah yang berupa upaya pencegahan, penindakan maupun pembinaan nampak belum mencapai hasil yang efektif dan efisien.

Selain itu adanya kendala bahwa para pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya mengalami beberapa masalah dalam motivasi kerja mereka, seperti Frustrasi karena kegagalan dalam menjalankan tugas dan adanya rutinitas yang membuat mereka jenuh, serta perasaan pasrah menerima keadaan tanpa harapan untuk mengadakan perubahan pada kondisi dan keadaan yang dihadapi oleh organisasinya maupun pribadi mereka sendiri.

Oleh karena itu perlu kiranya Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan perumusan tentang tujuan yang akan dicapai secara lebih baik dan spesifik, mengadakan perbaikan dalam sistem pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan suatu kebijakan, mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi secara lebih optimal, memperbaiki sistem administrasi dan pengolahan data, meningkatkan kualitas dan fungsi dari bagian penelitian dan pengembangan pada masing-masing instansi atau bagian, peningkatan profesionalisme, obyektivitas dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas yang memang menjadi tanggung jawabnya. Serta yang terpenting adalah bersedia terbuka terhadap segala macam kritik dan saran yang membangun, dengan cara melihat substansi pembicaraan bukan melihat siapa yang berbicara.